

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Unamet Yolanda Mariana Lekipera da Costa
NPP. 30.1123

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: yolandau770@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, S.E., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of this research is that there is a gap between financial planning and its implementation as well as the weak awareness of compliance with applicable regulations characterized by regional losses of IDR 527.45 billion. Based on the Audit Report of the BPK and internal supervisors, the remaining unpaid regional losses amounted to 50.74%. **Purpose:** The purpose of this study is to identify and describe the implementation of the Government's Internal Control System in Supervision of Regional Financial Management at the Regional Inspectorate of East Nusa Tenggara Province and the various inhibiting factors to this implementation. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. **Results:** The results showed that the Implementation of the Government's Internal Control System in Supervision of Regional Financial Management at the Regional Inspectorate of East Nusa Tenggara Province was still ineffective. **Conclusion:** Inhibiting factors such as: knowledge, understanding, attitudes and patterns of implementing SPIP towards its implementing regulations, quality of human resources and budget availability. In this writing, the researchers also provide suggestions, namely: it is necessary to develop systemic implementation innovations starting from an understanding of the material content of the SPIP implementing rules and making SPIP a necessity, not just an obligation. Furthermore, it is necessary to improve internal and external coordination with the BPKP as a supervisor in the form of education and training in overcoming various factors hindering the implementation of the Government Internal Control System.

Keywords: Implementation; Regional Finance; Internal Control System

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara perencanaan keuangan dan pelaksanaannya serta lemahnya kesadaran kepatuhan terhadap aturan yang berlaku ditandai dengan kerugian daerah yaitu sebesar Rp. 527,45 Miliar. Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan pengawas internal, sisa kerugian daerah yang belum disetorkan sebesar 50,74%. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbagai faktor penghambat terhadap implementasi tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kurang efektif. **Kesimpulan:** Faktor penghambat seperti: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola pelaksana SPIP terhadap aturan pelaksanaannya, kualitas sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran. Dalam penelitian ini peneliti ikut memberikan saran yaitu: perlu dilakukan pengembangan inovasi penyelenggaraan secara sistemik mulai dari pemahaman tentang materi muatan aturan pelaksana SPIP dan menjadikan SPIP sebagai kebutuhan bukan hanya kewajiban semata. Selanjutnya perlu ditingkatkan koordinasi internal dan eksternal bersama BPKP sebagai pembina dalam wujud pendidikan dan pelatihan dalam mengatasi faktor berbagai penghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. **Kata Kunci:** Implementasi; Keuangan Daerah; Sistem Pengendalian Internal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keseriusan pemerintah untuk menerapkan *good governance* dan *clean governance* melalui peningkatan kualitas pengendalian internal ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai Pasal 58 UU tersebut, diterangkan bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 58 Undang-Undang tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada gubernur sehingga dituntut untuk menjalankan SPIP dengan baik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sudah sejak tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan SPIP bekerjasama dengan BPKP Provinsi NTT.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Hal ini disebabkan penerapan SPIP belum secara integral menyatu dengan instansi. Tantangan lainnya yaitu mengubah mindset Pemerintah Daerah dan OPD agar SPIP dijadikan kebutuhan, bukan hanya sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator dan penggerak SPIP di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum tercapainya sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU. Hal ini ditandai dengan jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP > Level 3 baru mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab capaian kinerja tersebut belum mencapai target dikarenakan inspektorat daerah belum menjalankan PKPT berbasis risiko sehingga belum dapat memberikan *early warning system* pada perangkat daerah pada lingkup kerjanya. Hal ini mempengaruhi pencapaian inspektorat dalam mencapai maturitas SPIP > Level 3.
- 2) Dari hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester II tahun 2021 terdapat 16.757 temuan kerugian daerah yaitu sebesar Rp 527,45 Miliar. Data IHPS II Tahun 2021 BPK RI menjelaskan bahwa terdapat 3 kasus kerugian daerah di NTT yakni kerugian daerah yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap, kerugian daerah yang masih dalam proses pembebanan dan kerugian yang masih dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan pengawas internal, sisa kerugian daerah yang belum disetorkan sebesar 50,74%. Hal ini merupakan dampak dari lemahnya SPIP yaitu meningkatnya risiko kecurangan (*fraud*) dan penggelapan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah.

- 3) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp.14.304.424.650,00. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana prasarana yang tersedia dan tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi SPIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Ristanti, dkk berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*, menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengimplementasikan SPIP memberi banyak manfaat terutama pelaporan keuangan yang dihasilkan andal (Ristanti, Ni Made Asih dan Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana, 2014). Penelitian Dian Pertiwi mengkaji penerapan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tolak ukur keberhasilan pada keefektifan unsur-unsur SPIP yang menanamkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Dian Pertiwi, 2016). Penelitian A.B.Setiawan dan R.P.Tami menemukan bahwa kompetensi SDM mampu memoderasi SAP dan SPIP terhadap kualitas LK (laporan keuangan) Pemkot Bogor (A.B.Setiawan dan R.P.Tami, 2015). Selanjutnya penelitian Desti Amelia dan Abdul Halim menemukan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, menambah keyakinan auditor independen bahwa tidak terdapat salah saji/input material dalam laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat (Desti Amelia dan Abdul Halim, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Hasby, dkk ditemukan kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain belum memadainya sumber daya manusia yang ada masih baik dari kualitas maupun kuantitas (Hasby, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kaitannya dengan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai faktor penghambat terhadap implementasi sistem tersebut. Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif juga berbeda dengan penelitian Hasby. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni teori Sistem Pengendalian Intern menurut Boynton (2006) dengan 5 (lima) dimensi yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta faktor penghambat yang dihadapi dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi.

II. METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan studikasus (*case study*) dalam menyajikan dan menganalisis data yang hasilnya lebih menekankan pada pemahaman dan fakta yang terjadi di lapangan dalam hal ini kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 (tujuh) orang informan. Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data terhadap angka- angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara bersama informan yang akan disajikan sebagai data primer. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kaitannya dengan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan

indikator dari Teori Boynton (2006) tentang Sistem Pengendalian Intern. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

a. Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya memiliki Petunjuk Operasional Rutin (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). TOR sebagai Kerangka Acuan Kegiatan membutuhkan RAB karena berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah kegiatan serta besaran biaya dari masing-masing komponen. Selanjutnya untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dilakukan rapat pengelola keuangan secara berkala minimal 1 bulan sekali sebagai bentuk komunikasi efektif pelaksanaan SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

b. Penilaian Risiko

Berdasarkan uraian di atas, penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilaksanakan dengan cukup baik namun tidak dapat dipungkiri dalam penerapannya masih ditemui hambatan-hambatan yang terjadi. Peneliti menyimpulkan bahwa fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran yang terjadi di Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan akibat dari lemahnya penerapan SPIP khususnya unsur penilaian risiko. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan keuangan dan pelaksanaannya sehingga diperlukan solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

c. Kegiatan Pengendalian

Penerapan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian di Inspektorat Daerah Provinsi NTT masih mengalami kegagalan yaitu bukti bahwa sistem gagal dalam menyediakan keluaran yang akurat dan lengkap, bukti kegiatan pengendalian yang diidentifikasi dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam penyajian informasi akuntansi terbukti adanya manipulasi atau kecurangan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan pengawas internal tahun 2021, sisa kerugian daerah di Provinsi NTT yang belum disetorkan sebesar 50,74%. Walaupun proses pengendalian telah dilakukan secara berjenjang dan sistematis namun masih terdapat kelemahan pada unsur kegiatan pengendalian yaitu meningkatnya risiko kecurangan (*fraud*) dan penggelapan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

d. Informasi dan Komunikasi

Penerapan SPIP Unsur Informasi dan komunikasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilaksanakan dengan baik. Inspektorat Daerah Provinsi NTT pun telah memanfaatkan setiap sarana komunikasi melalui aplikasi dengan baik agar

informasi yang dibutuhkan oleh pegawai maupun masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dapat diakses dengan mudah melalui website, blogspot, facebook, youtube, instagram serta aplikasi *WhatsApp* grup.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Penerapan SPIP Unsur Pemantauan Pengendalian Intern di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah diupayakan dengan baik, dimana Inspektorat Daerah Provinsi NTT seringkali melakukan penilaian sendiri yang telah dijadwalkan secara rutin untuk membantu pimpinan atau suatu instansi mendeteksi lebih dini permasalahan yang terjadi, sehingga dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Hal ini disebabkan penerapan SPIP belum secara integral menyatu dengan instansi. Tantangan lainnya yaitu mengubah mindset Pemerintah Daerah dan OPD agar SPIP dijadikan kebutuhan, bukan hanya sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut yaitu belum tercapainya sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU, Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan pengawas internal, sisa kerugian daerah yang belum disetorkan sebesar 50,74%. Hal ini merupakan dampak dari lemahnya SPIP yaitu meningkatnya risiko kecurangan (*fraud*) dan penggelapan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah, serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp.14.304.424.650,00. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana prasarana yang tersedia dan tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tiap unsur SPIP telah diupayakan dengan baik namun unsur Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian masih mengalami kegagalan ditandai dengan adanya kesalahan penggunaan anggaran yang merugikan daerah dan tingkat maturitas SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum menyentuh level >3. Sedangkan unsur Lingkungan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern dapat terbilang terlaksana dengan baik dan memadai.
2. Faktor penghambat terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain pengetahuan aturan pelaksana bersifat formalitas, lemahnya pemahaman pelaksana SPIP terhadap materi muatan aturan pelaksana, sikap menganggap penting aturan namun pola pelaksana SPIP tidak secara memadai berpedoman pada aturan pelaksana, Kualitas sumberdaya manusia, serta ketersediaan anggaran cukup besar namun lemah pada inovasi perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih prospektif daripada kegiatan sosialisasi.
3. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi hambatan yang ditemui dalam penerapan SPIP antara lain Penegakan nilai etika dan integritas serta komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai, membentuk satuan tugas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pembuatan Buku Saku SPIP.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Gunawan (2016:112).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi SPIP untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Tuhan Yesus dan keluarga khususnya orang tua saya yang selalu ada dan mendukung dalam setiap hal. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Yunus, H. (2000). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.

Hidayah, K dan Rustan, A. 2015. "Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara", PKP2A III Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*/Volume 11/No. 1/2015.

Fitriani. 2021. "Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai", *Jurnal Sinar Manajemen*/Volume 08/No. 2/2021.

Amelia, D. dan Halim, D. 2021. "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman", *Behaviorial Accounting Journal*/Volume 4/No. 1/2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 60 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT